



KUMPULAN

CERITA PERUBAHAN **KOMPAK**

PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN MASYARAKAT



Daftar Isi



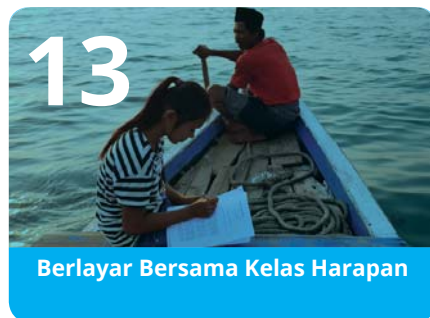
1
PAUD HI Wujudkan Pendidikan Menyeluruh Sejak Dini



5
TAPE MANIS Pastikan Semua Penduduk Miskin Terlayani



9
Babat Alas Gerakan KUDU Sekolah di Pekalongan



13
Berlayar Bersama Kelas Harapan



15
GKB: Merangkul Anak-anak Kembali Bersekolah



17
Kolaborasi Mewujudkan Pelayanan Dasar Berkualitas Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedalaman



21
Membangun Sekolah Impian



26
Universitas Membangun Desa (UMD) KOMPAK Mengantar Desa Menuju Kemandirian

PAUD HI Wujudkan Pendidikan Menyeluruh Sejak Dini



▲ Target capaian penyelenggaraan PAUD-Hi berdasarkan bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, serta Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan anak usia dini.

Keceriaan nampak pada wajah Muhammad Ferdinan Alhabi (5), bocah asal Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sembari didampingi sang ibu, Anisa Fitri Utami (25) dan ayahnya Januar (28), Muhammad sibuk belajar di ruang tamu rumahnya. Ibunya secara telaten memberi arahan kepada Muhammad mengenai materi dasar yang ia pelajari di sekolahnya.

Muhammad memang seperti anak sebayanya, namun ia nampak sedikit berbeda dalam hal berkomunikasi dengan ibunya. Jika kebanyakan anak hanya mengikuti kemauan orang tua ataupun selalu berkehendak semaunya, Muhammad justru kerap mengajukan pertanyaan kritis terlebih dahulu pada ibunya jika ingin melakukan sesuatu.

Anisa pun demikian. Dalam memutuskan sesuatu, ia selalu mengikutsertakan Muhammad baik dalam memilih barang ataupun saat menghadapi permasalahan ketika menemani anaknya mengerjakan tugas. Komunikasi tersebut terjalin lantaran sekolah tempat Muhammad menuntut ilmu di TK ABA 2 Sikasur menerapkan model pembelajaran holistik. Model pembelajaran holistik tidak hanya mendorong anak untuk berkembang sesuai dengan usia, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter yang diharapkan bisa membentuk sikap/tingkah laku peserta didiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sana, Anisa dan Muhammad belajar dan mendapat layanan secara menyeluruh (holistik) yang mencakup layanan pendidikan, gizi dan kesehatan, serta pengasuhan dan perlindungan guna mengoptimalkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Anisa merasakan sendiri, pembiasaan-pembiasaan holistik yang ditanamkan di sekolah anaknya, membuat ia paham akan pentingnya mendampingi anaknya secara menyeluruh untuk memenuhi hak anak.

“Sebelumnya saya hanya *tau* kalau sekolah ya belajar dan belajar. Namun saat tempat sekolah anak saya menerapkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), saya sedikit tahu kalau pemenuhan hak anak tidak hanya belajar membaca tapi banyak aspek di dalamnya, dan itu penting untuk masa depan anak,” kata Anisa.

Anisa juga menceritakan, bagaimana penerapan PAUD HI mengubah pola asuh orang tua ke anak. “Saya jadi melek, bahwa pendidikan dasar tidak hanya pendidikan seperti era dulu, namun harus terintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai seperti moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan esensial anak,” jelasnya.

Ini yang mendasari Anisa untuk selalu melibatkan anak dalam berbagai hal termasuk tidak memaksakan kehendaknya



▲ Penyelenggaraan PAUD merupakan upaya perwujudan SDGs yang menargetkan APK PAUD mencapai 100% pada tahun 2030.

terhadap sang anak. Dengan begitu Anisa berharap, anak semata wayangnya ini bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki kepribadian yang baik.

Adapun TK ABA 2 Sikasur tempat Muhammad menempuh ilmu merupakan satu di antara enam wilayah uji coba untuk pengaplikasian model PAUD HI di Kabupaten Pematang. Penerapan model PAUD HI dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan perbaikan tata kelola pada layanan dasar termasuk sektor pendidikan. Tujuannya, agar anak usia 3 hingga 6 tahun bisa mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Penetapan uji coba penerapan model PAUD HI yang merupakan rangkaian dari tahapan penguatan dukungan

multi pihak untuk PAUD di desa, diinisiasi oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pematang bersama KOMPAK di tahun 2019. Sebagai langkah awal, KOMPAK melakukan pemetaan dan menggali permasalahan pendidikan termasuk PAUD yang lokasinya di desa. Proses ini dilakukan dengan mengamati kesenjangan daerah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan dukungan teknis dalam tata kelola layanan PAUD yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Pematang.

Berdasarkan perencanaan strategis dan arah kebijakan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang, ditemukan APK PAUD di Kabupaten Pematang masih relatif tergolong rendah sekitar 56,68% (2013). Masalah lainnya

juga ditemukan bahwa belum adanya koordinasi dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penanganan PAUD, cenderung masih berjalan sendiri-sendiri, dan setiap sektor fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing saja. Selain itu, dukungan anggaran baik dari tingkat kabupaten dan desa masih belum maksimal karena prioritas pembangunan untuk PAUD belum optimal.

Kemitraan yang dilakukan KOMPAK bersama Pemkab Pemalang, juga mencetuskan beberapa regulasi seperti Peraturan Bupati No 64 tahun 2019 tentang PAUD HI dan Surat Keputusan Bupati No. 422 tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pemalang, Indra Sulistiyono, pendampingan ini membantu pemda untuk meningkatkan mutu layanan satuan PAUD HI. "Berkat pendampingan KOMPAK, sisi regulasi menjadi diperkuat yang akhirnya mendorong peran lintas sektor untuk memperbaiki kualitas layanan dan lembaga PAUD HI," katanya.

Dituturkan Indra, berkat pendampingan tersebut kini pemda mengalokasikan anggaran melalui APBD, serta memberikan bimbingan teknis pelatihan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan dalam mengimplementasikan

pembelajaran yang diselenggarakan satuan PAUD sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

"Beberapa OPD yang terintegrasi untuk menyukseskan pelaksanaan PAUD HI menganggarkan pendanaan untuk sejumlah kegiatan, seperti Dinsos terkait perlindungan anak, Dinkes untuk memantau tumbuh kembang anak, hingga Disdukcapil untuk memberikan layanan kependudukan terhadap anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA). Dindik pun menyelenggarakan program peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUD HI. Banyak aspek yang diberikan baik motorik, agama, moral, serta seni, dan kami memastikan aspek tersebut sudah terpenuhi pada layanan PAUD," ucapnya.

Berkat kolaborasi antar OPD untuk mendukung PAUD HI, Kabupaten Pemalang menerima anugerah Kabupaten Layak Anak untuk tingkat madya di bulan Juli 2021. Adapun salah satu indikator penganugerahan ini adalah dengan adanya penyelenggaraan PAUD HI.

Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI Kabupaten Pemalang

Berdasarkan data Dindik Kabupaten Pemalang, APK PAUD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar 75%, meningkat bila dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang hanya 68% lebih. Capaian ini

merupakan dampak dari upaya penyelenggaraan lintas sektor melalui Gugus Tugas PAUD HI yang diselenggarakan oleh Pemkab Pemalang. Selain memfasilitasi penetapan Peraturan Bupati dan pembentukan Gugus Tugas PAUD HI, pendampingan KOMPAK kepada Pemkab Pemalang juga mendorong disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI di Kabupaten Pemalang 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan PAUD HI.

Kasubid Pendidikan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM) Bappeda Kabupaten Pemalang, Dwi Puji Astuti menyebutkan dalam RAD PAUD HI tercantum mekanisme koordinasi, pelaksanaan, dan monitoring intersektoral untuk mendukung PAUD HI. Target kerja lintas sektor tersebut dituangkan dalam rencana kerja Gugus Tugas PAUD HI yang terintegrasi dan dapat ditemukan pada satuan PAUD HI melalui uji coba layanan PAUD HI. Ke-enam wilayah uji coba PAUD HI yang ada di Kecamatan Belik yaitu KB Arroyan di Desa Gombong, KB Al Ikhlas di Desa Badak, TK ABA 2 di Desa Sikasur, TK Qurrota Ayyun di Desa Beluk, RA Muslimat Salafiyah di Desa Bulakan, dan TK Pertiwi di Desa Gunung Jaya, dengan rata-rata kehadiran dari 50 peserta didik.

"Melalui sinergi yang kami bangun bersama KOMPAK, kami berhasil menerapkan penyelenggaraan PAUD HI yang lebih baik. Serta didukung

dengan adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan, hingga tercetus RAD PAUD HI dimana semua OPD berkewajiban mengawal pelaksanaan PAUD HI," terangnya.

Menurut Dwi, selain memastikan indikator capaian setiap anggota gugus tugas PAUD HI yang diatur didalam RAD tercapai, dukungan KOMPAK juga mendorong OPD untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD HI. Misalnya Dinas Pendidikan telah menganggarkan sekitar 4 miliar rupiah, dan Dinkes yang mencapai ratusan juta untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada satuan PAUD agar menerapkan pendekatan holistik dalam pembelajarannya. "Disdukcapil juga mendukung untuk memenuhi kebutuhan anak mengenai administrasi kependudukan. Bahkan berkat program PAUD HI, inovasi jemput bola agar anak-anak mendapatkan akta juga tercetuskan," ucapnya.

Dwi menambahkan, melalui program tersebut pemahaman orang tua mengenai kebutuhan dasar anak, pentingnya kesehatan dan tumbuh kembang anak juga meningkat.

Pemenuhan Prinsip Tumbuh Kembang Anak

Satu di antara OPD yang ikut bergerak untuk menyukseskan penerapan PAUD HI adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang merupakan anggota Gugus Tugas PAUD HI. Mereka mengadakan

peningkatan kapasitas terkait kegiatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), bukan hanya untuk tenaga kesehatan tetapi juga untuk tenaga pendidik pada satuan PAUD. Dinkes juga melakukan kerjasama dengan Puskesmas yang dapat menjangkau layanan di satuan PAUD agar dapat memberikan edukasi mengenai kesehatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak dalam hal pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang.

Susi Kusumawati, Analis Gizi Bidang Kesmas, Dinkes Kabupaten Pemalang menjelaskan, dengan edukasi tersebut harapannya para tenaga pendidik dengan pendampingan dari tenaga kesehatan bisa mendeteksi tumbuh kembang anak didik. "Misalnya ada gangguan tumbuh kembang, mereka bisa menilai status gizi melalui tabel yang sudah dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, serta informasi di buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)," paparnya.

Selain pelaksanaan kegiatan SDIDTK, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meningkatkan pemahaman tentang empat prinsip hak anak kepada para tenaga pendidik PAUD yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup



Lokasi layanan PAUD-HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya. ▲

atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Susi sangat berharap dukungan kegiatan dari lintas sektor melalui anggota Gugus Tugas PAUD HI pada satuan PAUD di Kabupaten Pemalang dapat berlanjut dan merata, karena penerapan metode PAUD HI yang didukung berbagai pihak akan berpengaruh pada masa depan anak. "Hal ini jelas berbeda dengan metode PAUD era dahulu yang hanya menganggap anak sekedar anak tanpa ada keterlibatan dan pemahaman yang diajarkan melalui edukasi," tambahnya.

TAPE MANIS Pastikan Semua Penduduk Miskin Terlayani



Heru Sugianto saat mengajukan bantuan pengobatan anaknya di Posko TAPE MANIS. ▲

Heru Sugianto nampak kebingungan ketika memasuki bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani 64, Bondowoso. Perlahan, dia memasuki ruangan, dan disambut ramah oleh dua orang front office di tempat yang menjadi Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten Bondowoso. Merupakan akronim dari Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin, TAPE MANIS memberikan harapan kembali bagi penduduk miskin di Bondowoso yang belum terjamah berbagai program bantuan sosial selama dua tahun terakhir ini. Sebelum adanya program ini, warga miskin tidak tahu harus mengadu kemana. Secara kelembagaan, program ini dipayungi oleh Peraturan Bupati Nomor 42A/2019 tentang Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin.

Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) adalah upaya bersama dan terpadu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan dukungan KOMPAK menginisiasi inovasi ini pada 2018. KOMPAK memberikan dukungan untuk memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bondowoso, menyusun Peraturan Bupati Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan TAPE MANIS, menyusun pedoman pelaksanaan dan SOP (*Standard Operating Procedures*) dari TAPE MANIS, meningkatkan kapasitas petugas layanan TAPE MANIS, dan mengembangkan aplikasi TAPE MANIS versi android. Gerakan TAPE MANIS mampu berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bondowoso dari 14,39% pada 2018 menjadi 13,33% pada 2019.

Menempati salah satu ruangan di rumah dinas Wakil Bupati Bondowoso, Posko TAPE MANIS tidak pernah sepi dari masyarakat miskin yang membutuhkan layanan. Ada yang diwakili kepala desa atau bidan desa. Ada juga yang datang sendiri seperti yang dilakukan Heru. Laki-laki yang bekerja sebagai tukang las listrik ini, sedang mengajukan bantuan untuk pembiayaan operasi anak laki-lakinya yang terkena tumor jinak.

“Awalnya jatuh di pondok (pesantren). Tangannya jadi bengkok. Sudah pernah dioperasi. Sekarang tumbuh benjolan lagi, dan harus operasi (lagi).” Menurut Heru, dia sudah tidak mampu lagi membiayai operasi kedua ini. Uang tabungan sebesar Rp6 juta sudah habis ia gunakan untuk membiayai operasi yang pertama. Heru sudah putus asa, tidak tahu harus kemana mencari biaya. Untungnya, salah seorang tetangganya yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Bondowoso, menyarankan Heru untuk datang ke tempat ini. Pengajuan bantuan yang dilakukan Heru masih akan melalui beberapa tahapan lagi. Tetapi Heru lega. Paling tidak, dia bisa berharap, sudah ada solusi biaya untuk operasi anaknya.

Berbeda dengan Heru, Noviana Oktavia Vitaloka sudah merasakan manfaat

dari program ini ketika tahun 2020 lalu, ia harus menjalani operasi *caesar* darurat karena komplikasi kehamilan (pre-eklamsia) waktu melahirkan anak pertama. Saat itu ia sudah tidak perlu mengeluarkan biaya satu rupiah pun karena Noviana mendapatkan bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diajukan lewat TAPE MANIS. Tanpa Jampersal, sulit bagi perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai staf pelayanan di kantor Desa Taman, Kecamatan Grujugan ini membiayai operasi darurat ini. “Tidak siap dengan biaya juga. Ketika dibawa ke rumah sakit saya sudah tidak sadarkan diri.” Saat itu, Noviana juga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Bidan desa yang merekomendasikan untuk diajukan Jampersal karena kehamilan risiko tinggi,” terang Adi Sonhaji, Kepala Desa Taman. Menurut kepala desa yang sudah menjabat selama dua tahun ini, di Taman, bidan desa melakukan *screening* ibu hamil berisiko tinggi ketika posyandu bulanan. Ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin akan dibantu pemerintah desa untuk memperoleh Jampersal lewat TAPE MANIS setelah kehamilan berusia tujuh bulan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, TAPE MANIS juga mampu menjadi solusi intervensi bagi penduduk miskin yang selama ini luput dari program pemerintah nasional atau pemerintah daerah karena berbagai sebab. Misalnya,

Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terdaftar, atau tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah. “Sebelumnya kita (beberapa Organisasi Perangkat Daerah/ OPD) melakukan identifikasi masalah. Berpikir, apa yang harus dilakukan,” ungkap Anissa Hamidah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

Menurut Dewi Rahayu, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso, Gerakan TAPE MANIS ini merupakan perwujudan dari misi ketiga Bupati Bondowoso yaitu, kesejahteraan sosial. Di dalamnya, termasuk penanggulangan kemiskinan. TAPE MANIS menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan karena angka kemiskinan masih tinggi di Bondowoso.

Dari data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 14,39% pada 2018. Sebagai program kolaborasi berbagai OPD yang dipimpin oleh wakil bupati, gerakan ini cukup unik. Sebab, sumber pembiayaan justru didapatkan dari berbagai sumber, utamanya dari sektor non-pemerintah. Diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta di Bondowoso, lembaga non-pemerintah, seperti Ruang Pasien, dan berbagai sumber

lainnya, termasuk individu. Di awal, BAZNAS mengalokasikan Rp20 juta per tahun untuk mendukung Gerakan TAPE MANIS. "Sekarang naik menjadi Rp50 juta," terang Dewi Rahayu. Menurutnya, jumlah alokasi bantuan untuk tiap orang akan berbeda. "Unit cost perawatan berbeda. Tetapi, untuk maksimal, bantuan dari BAZNAS sekitar Rp2,5 juta."

Harus Lolos Verval dan Survei

Di TAPE MANIS, aduan dikategorikan gawat darurat dan tidak gawat darurat. Aduan darurat seperti kebutuhan biaya operasi atau melahirkan. Aduan tidak darurat seperti bedah rumah atau biaya pendidikan. Untuk aduan darurat, biasanya langsung ditangani dengan alokasi anggaran dari BAZNAS atau CSR, sedangkan aduan non-darurat, akan dijadikan rekomendasi bagi OPD terkait untuk menjadi program prioritas. Misalnya, kebutuhan biaya sekolah menjadi prioritas Dinas Pendidikan; dan rehabilitasi rumah menjadi prioritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pengajuan bantuan lewat TAPE MANIS pun cukup mudah. Warga yang membutuhkan bantuan, bisa mengajukan lewat Posko TAPE MANIS di desa, atau bisa langsung datang ke Posko TAPE MANIS di kabupaten. Jika mengadu di desa, pemerintah desa lewat operator akan memasukkan aduan ke dalam aplikasi TAPE MANIS, untuk



Ibu hamil bisa mendapatkan bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diajukan melalui TAPE MANIS. ▲

kemudian diproses di posko tingkat kabupaten.

Syarat pengajuan bantuan juga sederhana. Masyarakat cukup menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah, pengantar dari kepala desa, dan foto-foto pendukung yang diperlukan untuk pengajuan Jampersal. Sedangkan untuk bantuan biaya pengobatan tidak diperlukan surat nikah. Setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Posko TAPE MANIS kabupaten, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) data pemohon di Sistem Informasi Administrasi Desa (SAID) untuk memastikan bahwa pemohon sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memang belum terjangkau oleh program dari pemerintah dalam bentuk apapun. Verval ini sebenarnya juga bisa dilakukan di desa. Tetapi, umumnya pemerintah desa atau pemohon langsung membawa berkas ke Posko TAPE MANIS kabupaten. "Biar langsung tahu tindak lanjutnya," jelas Adi Sonhaji.

Menurut Adi, di Desa Taman saat ini belum ada posko dan operator TAPE MANIS karena belum tentu tiap hari ada pengaduan.

Selesai verval data, petugas survei TAPE MANIS akan mendatangi rumah pemohon untuk memastikan pemohon memang layak untuk mendapatkan bantuan. Menurut Nasrullah, salah satu *surveyor* TAPE MANIS, walau petugas sudah dibekali dengan serangkaian pertanyaan standar dari Kementerian Sosial (Kemensos), kejelian dari *surveyor* memegang peranan penting. Penduduk dengan kategori "miskin" menurut standar Kemensos belum tentu miskin. Sebaliknya, mereka yang masuk kategori "kaya" justru sangat membutuhkan bantuan. "Indikator yang lebih menentukan adalah pekerjaan pemohon," terang Nasrullah. Menurutnya, tidak sedikit pemohon yang mengajukan bantuan tinggal di rumah yang bagus, tetapi ternyata statusnya masih menumpang dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Mendapatkan kategori layak menerima bantuan dari tim *surveyor* belum tentu mereka langsung mendapatkan bantuan. Untuk aduan kegawatdaruratan kesehatan, masih diperlukan persetujuan Dinas Kesehatan (Dinkes). Jika Dinkes menolak, masyarakat juga tidak mendapatkan bantuan. Bantuan baru bisa diproses jika Dinkes sudah setuju. Ketika bantuan diproses, mereka juga secara otomatis didaftarkan sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/KIS. Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa bersama Dinsos akan memasukkan informasi terbaru penduduk miskin ini di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG), untuk memperbaharui informasi di DTKS mereka. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan perlindungan sosial bagi mereka yang miskin dan rentan. Jika pengajuan permohonan sesuai prosedur dan data yang diajukan sudah benar, hanya dibutuhkan waktu sehari untuk seluruh proses ini.

Moving Forward, No One Left Behind

Manfaat TAPE MANIS sudah jelas. Pertama, warga miskin mendapatkan saluran untuk akses pengaduan dan mendapatkan bantuan. Menurut Merim Sirnovita, staf Posko TAPE MANIS kabupaten, sampai akhir Agustus 2021, sebanyak 1.958 pengaduan telah ditindaklanjuti. Kedua, bagi pemerintah daerah, bisa menjadi cara

untuk mencari aspirasi bagi perencanaan pembangunan. "Data Posko TAPE MANIS bisa menjadi masukan untuk pembuatan program prioritas dan penganggaran pemerintah daerah," tegas Dewi Rahayu. Ketiga, untuk merapikan data orang miskin. Saat ini di Kabupaten Bondowoso, sebanyak 71.282 penduduk miskin telah mendapatkan bantuan, tetapi datanya belum masuk DTKS. "Harapannya semua orang miskin datanya tercatat di DTKS," imbuh Annisa Hamidah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk terus mengembangkan TAPE MANIS sehingga semakin banyak masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari inovasi ini. Menurut Dewi Rahayu ada beberapa syarat untuk mengembangkan potensi Gerakan TAPE MANIS. "Pertama, desa harus lebih berperan dalam proses pemutakhiran data dan perlu mekanisme integrasi antara SAID dan SIKS-NG, sehingga sekali melakukan pemutakhiran data bisa langsung mengubah data SAID maupun SIKS-NG," tuturnya. Selain itu pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, laptop/komputer, dan sumber daya manusia (operator). "Keberadaan infrastruktur pendukung ini harus diperkuat sebagai antisipasi adanya ledakan aduan jika TAPE MANIS semakin dikenal oleh warga Bondowoso," imbuhnya.

Fajar Dewandaru dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso menambahkan soal pemanfaatan aplikasi TAPE MANIS untuk mendukung pengembangan inovasi ini di masa depan. "Pemerintah desa harus memanfaatkan aplikasi TAPE MANIS, karena kita membangun aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan, jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Posko TAPE MANIS di kabupaten," terangnya. "Jika pemerintah desa lebih sering memanfaatkan aplikasi, kami jadi tahu fitur apa yang perlu ditambah atau diperbaiki supaya dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi," tambahnya.

Pengembangan Gerakan TAPE MANIS ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, melalui peraturan bersama antara Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan bantuan sosial sampai tingkat desa. Dalam penyaluran bantuan sosial, Kemensos membutuhkan data yang valid. Validasi data bisa dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan Dana Desa. "Dengan terbitnya regulasi nasional, lebih mudah menyusun perbupnya, karena bisa dianggarkan untuk pengembangan infrastruktur pendukung TAPE MANIS," tutup Dewi Rahayu.

Babat Alas Gerakan KUDU Sekolah di Pekalongan



Syahrul Ibad pernah memilih meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja membantu orang tuanya. ▲

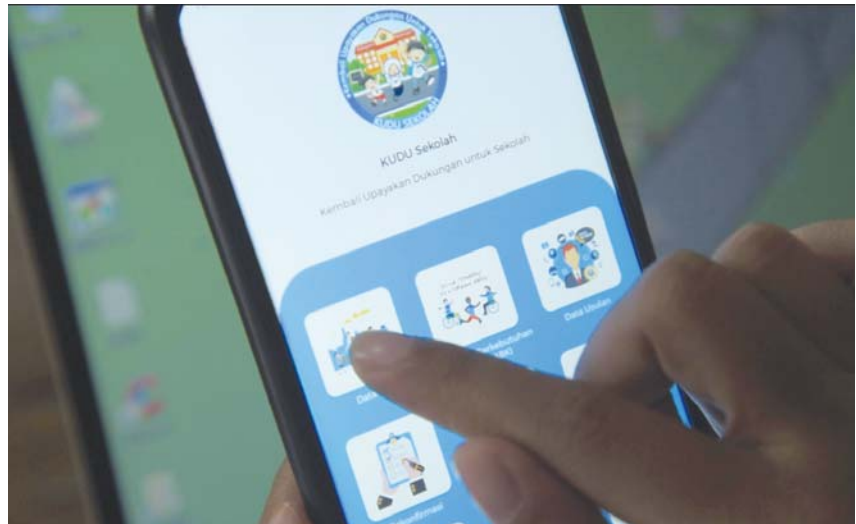
Berseragam putih abu-abu, Syahrul Ibad, menunjukkan ruangan kelas Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Syahrul (19) baru saja mengikuti kelas uji coba di masa pandemi Covid-19. Selama dua pekan terakhir, siswa kelas tiga ini kembali sekolah, bertatap muka setelah hampir dua tahun menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring untuk menghindari penularan virus Corona.

Banyak yang tak menyangka, jika anak ketujuh dari delapan bersaudara keluarga buruh tani ini pernah berhenti bersekolah setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Paninggaran pada tahun 2016. Ijazahnya bahkan sempat tertahan karena tunggakan iuran sekolah. Sejak itu, impiannya mendapatkan pekerjaan yang layak pun harus terhenti. Ia tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena kondisi ekonomi keluarga. Orang tuanya tak mampu membiayai sekolahnya.

Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Paninggaran, Syahrul memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta. "Saya memilih bekerja untuk mencari nafkah, membantu orang tua," ucap Syahrul. Ia sempat *menjajal* pekerjaan sebagai kuli panggul rongsokan besi selama enam bulan di ibu kota. Tugasnya mengangkut rongsok besi dan memindahkannya dari satu truk ke truk lainnya. Setiap hari, ia harus bekerja selama delapan jam dan mendapatkan upah di setiap akhir minggu sebesar Rp1 juta. Beban kerja yang begitu berat membuat Syahrul tidak betah, dan memutuskan untuk kembali ke kampungnya, Desa Paninggaran.

Sekembalinya ke kampung halaman, Syahrul kemudian membantu ayahnya di ladang sebagai buruh tani. Di tahun 2017, Rusdiyono, Kepala Desa Paninggaran, mendorong Syahrul untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Namun, tawaran Rusdiyono tak begitu saja diterima oleh Syahrul. Kepala desa berusia 55 tahun itu harus berkali-kali datang membujuk dan memotivasi Syahrul. Rusdiyono tak lelah untuk menyemangati dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri Syahrul. Bahkan, Rusdiyono juga menyediakan Syahrul seragam sekolah gratis untuk menarik minatnya kembali bersekolah.

Syahrul Ibad adalah potret ribuan anak di Kabupaten Pekalongan yang terpaksa putus sekolah. Berdasarkan Basis Data



Aplikasi KUDU Sekolah yang diluncurkan pada 2021 memperkuat proses pendataan ATS dan monitoring terhadap capaian KUDU Sekolah ▲

Terpadu (BDT) 2018, terdapat 4.346 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan. Kemiskinan, pernikahan dini, anak yang menyandang disabilitas, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan menjadi penyebab anak putus sekolah.

Oleh karena itu, pada Desember 2018, Pemkab Pekalongan menginisiasi program pengembalian ATS ke sekolah, hasil *rembuk* bersama Dinas Pendidikan dan Bappeda dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pekalongan di bidang pendidikan yang masih tergolong rendah, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Diambil dari inisial Kembali Upayakan Dukungan (KUDU) untuk Sekolah, gerakan KUDU Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan melalui partisipasi sekolah.

KOMPAK memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 tahun sebagai payung hukum untuk gerakan KUDU Sekolah. Peraturan Bupati Wajib Belajar 12 tahun dan sekolah inklusi yang telah diterbitkan menjadi salah satu komitmen dan upaya Pemkab Pekalongan dalam menurunkan angka ATS di Pekalongan.

Pada 2021, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan dukungan KOMPAK meluncurkan aplikasi KUDU Sekolah untuk memperkuat pendataan dan *monitoring* ATS. Aplikasi berbasis *website* dan android ini mengelola data ATS dari berbagai sumber, termasuk masyarakat. Aplikasi KUDU Sekolah memudahkan pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pembaharuan data ATS, verifikasi dan validasi serta *monitoring* terhadap capaian Gerakan KUDU Sekolah.

“Gerakan KUDU Sekolah pada dasarnya adalah gerakan kolaboratif seluruh elemen di masyarakat yang bertujuan mengembalikan ATS ke sekolah,” terang Subagyo, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Menurut Subagyo, salah satu kunci keberhasilan Gerakan KUDU Sekolah terletak pada peran aktif pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan pemantauan serta dukungan baik dalam bentuk alokasi anggaran, inisiatif khusus maupun peraturan desa yang mendukung pengembalian ATS ke sekolah.

Desa Paninggaran misalnya, telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pengadaan seragam, sepatu, dan kacamata gratis bagi ATS yang bersedia kembali bersekolah. Dana Desa senilai Rp12juta digunakan oleh Pemdes Paninggaran untuk membeli 30 seragam dan sepatu. “Kami berharap, dengan dukungan seragam, sepatu dan kacamata dapat membuat anak putus sekolah semakin tertarik untuk kembali ke sekolah sekaligus menambah kepercayaan diri mereka,” ucap Rusdiyono.

Rusdiyono menyadari bahwa sebagian ATS berasal dari keluarga miskin, umumnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pemetik teh, perajin batik, maupun pedagang angkringan. Mayoritas anak-

anak tersebut memutuskan berhenti bersekolah karena ingin membantu orang tua mereka mencari nafkah. Rusdiyono berpendapat bila ekonomi keluarga berjalan baik, kemungkinan orang tua mereka tidak akan keberatan jika anak mereka kembali melanjutkan pendidikannya.

Oleh karena itu, pemdes menggunakan berbagai pendekatan untuk menarik para siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Salah satunya dengan mengizinkan keluarga-keluarga miskin untuk menggarap lahan pertanian dan ladang milik pemdes, serta merencanakan pengelolaan budi daya ikan lele di kolam milik pemdes.

Rusdiyono kemudian menyarankan agar siswa tersebut melanjutkan sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pendidikan yang memiliki jadwal sekolah yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal. Siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM pada siang hari, dan tetap bisa membantu orang tua berjualan angkringan pada malam harinya.

Desa Paninggaran mencatat 56 siswa¹ berhasil kembali ke sekolah non-formal melalui PKBM, dan 7 siswa yang kembali ke sekolah formal. Ahmad Fawaid, Sekretaris PKBM Akar Nusa Desa Paninggaran,

mengatakan 56 siswa tersebut terdiri dari para siswa usia SD, SMP dan SMA. Para siswa di sekolah non-formal ini diberikan pelajaran ilmu terapan, seperti kerajinan batik, mewarnai dengan cat akrilik, serta keterampilan mengoperasikan komputer.

“Pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Memang lebih banyak disiapkan agar kemampuan mereka bisa langsung digunakan di dunia kerja,” kata Ahmad. Sistem pembelajaran berlangsung dua kali setiap pekan, yakni Senin dan Selasa pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Sebelum pandemi sistem pembelajaran berlangsung dengan meminjam gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Paninggaran.

Sementara di Desa Curugmuncar, Nur Hidayat, Sekretaris PKBM Jabal Rokhmah, menyebutkan terdapat 13 anak putus sekolah yang mengikuti pembelajaran non-formal di PKBM yang berlokasi di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriono tersebut. Di sana, kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung sebanyak dua kali dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum pandemi, pembelajaran berlangsung dengan meminjam gedung SD di masing-masing desa. Namun selama pandemi, pelajaran dilakukan secara daring. Para siswanya yang berasal dari Desa

¹ Data dari Dinas Pendidikan Pekalongan tahun 2019

Tlogopakis, Yosorejo, Simego, Kayupuring, dan Curugmuncar mendapat bimbingan dari enam guru *tutor* yang mengampu sekolah non-formal tersebut.

Sama seperti PKBM pada umumnya, Nur mengatakan PKBM membantu siswa sekolah secara fleksibel karena mereka tetap bisa bekerja untuk membantu keluarga. Dia mencontohkan siswa kejar paket C bisa belajar secara daring pada malam hari. Pagi hingga sore, siswa tersebut bekerja sebagai buruh di pabrik minyak wangi Jakarta.

Seperti yang terjadi pada Firda Sulistiana, salah satu siswa putus sekolah di Desa Curugmuncar. Ia putus sekolah setelah mengenyam pendidikan selama satu semester di SMA Negeri 1, Petungkriono, karena keluarganya tak mampu membiayai pendidikannya. Ibunya hanya berpenghasilan sebagai buruh tani dan merumput, sedangkan ayahnya harus tergolek lemah akibat menderita *stroke*.

Saat itu, Nur mendatangi rumah Firda dan membujuknya untuk kembali bersekolah. Ia memberikan pemahaman kepada orang tua Firda, bahwa pendidikan menjadi bekal anaknya memperbaiki taraf hidup anaknya di masa depan. Pada akhirnya, Firda bersedia melanjutkan pendidikannya dan memilih PKBM karena waktu belajar yang lebih *luwes*.

Menurut Nur Hidayat, di Kecamatan Petungkriono, para



Perangkat desa bersama PKBM mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak anak-anak mereka yang putus sekolah supaya kembali bersekolah ▲

siswa berhenti bersekolah juga karena sulitnya mengakses perjalanan menuju sekolah, selain karena faktor ekonomi. Untuk mencapai sekolah, siswa harus berjalan berkilo-kilo meter dengan jalan menanjak karena harus melewati perbukitan. Selain itu, di desa tersebut belum tersedia angkutan umum. "Kondisi geografisnya *terjal*. Bahkan, ada siswa yang harus menempuh 23 km untuk mencapai sekolahnya. Khususnya para siswa yang bermukim di pegunungan," tambahnya.

"Kami *babat alas*. *Door-to-door* ke desa-desa untuk membujuk anak-anak supaya mau kembali sekolah," ungkap Nufliyanti, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Anik Hariwayati, Sekretaris PKK Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan keterlibatan aktif ibu-ibu tim penggerak

PKK untuk mendekati anak tidak sekolah dan orang tua. Para kader tersebut biasanya mencari kesempatan mengobrol dengan orang tua ATS saat belanja di warung. "Sedangkan, dalam pertemuan RT, para kader PKK melakukan sosialisasi terkait pentingnya anak-anak kembali sekolah," ujar Anik.

Hingga akhir tahun tahun 2021, Bappeda Pekalongan mencatat sebanyak 1.397 anak kembali mengenyam bangku sekolah berkat gerakan KUDU Sekolah. Fadia A Rafiq, Bupati Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa Gerakan KUDU Sekolah mampu berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Gerakan KUDU Sekolah mampu mewujudkan mimpi anak-anak untuk kembali bersekolah. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita mereka dan membangun masa depan yang lebih gemilang," tutupnya.

Berlayar Bersama Kelas Harapan



Siswa Mengerjakan LKS di Sela-Sela Melaut ▲

Dua belas anak sibuk mengerjakan soal matematika. Hari itu mereka belajar tentang perkalian. Sepuluh soal tertulis di 'whiteboard' kumal penuh coretan, terpasang di dinding kelas warna kuning yang sudah terkelupas di sana-sini. Kegaduhan kelas sebelah tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menyelesaikan tugas siang itu. Kelas sebelah itu sejatinya ruang sebelah yang dibatasi sekat tripleks tipis. Angin laut yang masuk di sela-sela jendela tanpa kaca, tidak mampu mengusir panas dan pengap. Dari balik jendela, terhampar pemandangan Laut Sulawesi, lengkap dengan deretan kapal nelayan yang tertambat di dermaga, terombang-ambing angin musim timur.

Laut Sulawesi adalah tumpuan kehidupan bagi masyarakat nelayan di Pulau Sakuala, tempat SD Negeri 23 Sakuala di Desa Mattiro Bombang berada. Pulau Sakuala adalah satu dari 16 gugusan pulau di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Sebagian besar dari 100 kepala keluarga masyarakat Pulau Sakuala adalah nelayan 'renreng' dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah tamat Sekolah Dasar (SD).

"Memang, bagi sebagian masyarakat di wilayah kepulauan ini, mencari nafkah dengan melaut itu lebih penting dibandingkan sekolah," terang Rukmini, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Menurut catatan Dinas Pendidikan, angka putus sekolah, khususnya SD dan SMP di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara termasuk yang paling tinggi di Kabupaten Pangkep. Samsuar (40), salah seorang warga Sakuala membenarkan informasi tersebut. "Anak-anak itu kan membantu kita pergi ke laut. Pulang sudah capek dia, sering juga terlambat ke sekolah," tuturnya. "Daripada sering terlambat atau nggak masuk sekolah, ya kita minta anak kita nggak usah sekolah. Nggak enak sama ibu gurunya," imbuah Samsuar.

SD Negeri 23 Sakuala sendiri memiliki 75 siswa. Namun tidak semuanya mengikuti kegiatan belajar-mengajar secara teratur. Kepala Sekolah SDN 23 Sakuala Syukri Darmawan mengatakan bahwa semua anak didiknya memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. "Sebagian besar kembali ke sekolah, tetapi sebagian lagi kadang datang, kadang tidak," tuturnya. Menurut kepala sekolah yang sudah bertugas selama 4 tahun di SDN 23 Sakuala ini, anak-anak memilih tidak masuk sekolah karena malu tertinggal pelajaran dari teman-teman sekelasnya. Situasi ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah di wilayah kepulauan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep mencatat bahwa pada tahun ajaran 2016/2017 terdapat 179 siswa SD dan SMP yang pergi melaut di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara. Sebanyak 29% diantaranya, atau sebanyak 52 siswa terpaksa putus sekolah. Hal inilah yang mendorong Dinas Pendidikan untuk melahirkan inovasi Kelas Perahu. Kelas Perahu pada dasarnya adalah model pembelajaran mandiri, dimana siswa menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan belajar selama pergi melaut.

"Kami menyiapkan LKS bagi anak-anak yang akan pergi melaut. LKS ini disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)," jelas Amalia, salah seorang guru

honorar di SDN 23 Sakuala. Guru memberikan LKS ini dalam kelas bimbingan tambahan, khusus bagi siswa program Kelas Perahu. LKS ini dikerjakan oleh siswa selama melaut dan dikumpulkan pada saat mereka kembali. "Ketika anak-anak kembali, kami sama-sama membahas LKS tersebut. Sehingga anak-anak yang harus pergi melaut tidak ketinggalan pelajaran," tambah Amalia.

Dari Pulau Sakuala sendiri, sedikitnya ada 15 siswa yang mengikuti program Kelas Perahu. Yusuf (13) dan Riska (13) ada diantaranya. "Saya senang ada Kelas Perahu. Saya bisa tetap bisa membantu orangtua sambil belajar," tutur Yusuf. Yusuf mengerjakan LKS disela-sela aktivitas melaut bersama sang ayah. "Biasa abis kasih turun perangkap kepiting saya belajar. Nanti subuh baru angkat lagi perangkap kepiting," terangnya.

Sementara Riska, yang sudah membantu ayahnya melaut sejak sebelum usia sekolah, mengatakan dirinya terbantu dengan bimbingan khusus yang diberikan bagi murid-murid Kelas Perahu. Bimbingan khusus ini membuatnya bisa tetap mengikuti pelajaran. "Sejak ada Kelas Perahu, saya bisa lanjut SMP. Saya ingin terus sekolah sampai universitas," ungkapinya.

Saat ini, Kelas Perahu yang sudah dilaksanakan di 19 Sekolah Dasar dan 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhasil menurunkan angka

putus sekolah siswa yang melaut pada tahun ajaran 2017/2018, menjadi 27 orang (15%).

"Kelas Perahu sudah ada di semua pulau, dari Salemo, Karanrang, Smatallu, Sagara, Satando, Sabutung, Sakuala, Polewali, Sapuli, Sabangko, Laiya dan Saugi," terang Rukmini. Menurutnya, keberhasilan Kelas Perahu adalah berkat kerjasama beberapa pihak, baik pemerintah dan masyarakat, serta pihak-pihak yang peduli pada pendidikan. "Salah satunya adalah KOMPAK. KOMPAK adalah mitra kami dalam menyusun dan mengembangkan inovasi Kelas Perahu ini," tambah Rukmini.

"Saya mendukung Kelas Perahu. Soalnya dulu lebih baik saya kasih keluar anak saya dari sekolah. Habis tidak ada waktu lagi dia ke sekolah," tutur Antok (35), salah seorang orangtua murid. Menurutnya, Kelas Perahu adalah bukti keseriusan pemerintah untuk memajukan kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. "Karena pendidikan itu adalah hak semua anak Indonesia, termasuk anak-anak nelayan di wilayah kepulauan," imbuhnya.

GKB: Merangkul Anak-anak Kembali Bersekolah



Ismatun Amanah belum genap 13 tahun ketika memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Tentu, pergi jauh meninggalkan rumah bukan keinginan anak ke-9 dari 10 bersaudara itu. Namun karena tak lagi bersekolah dan ingin membantu orang tua, pilihan tersebut harus ia ambil.

Di Jakarta, Ismatun hanya bertahan tak lebih dari satu minggu. Majikan tempat ia bekerja, memintanya untuk pulang kampung karena gadis manis itu sering menangis. "Itu dia nangis mikirin ibunya terus. Ya sudah, akhirnya balik lagi ke rumah nda jadi kerja. Karena memang masih kecil juga anaknya," ujar Sakrup ayahnya.

Ismatun adalah satu dari belasan ribu anak di Kabupaten Brebes yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan dukungan berbagai pihak sejak tahun 2017 merintis Gerakan Kembali Sekolah (GKB). "Alhamdulillah karena ada GKB ini, Ismatun bisa pulang untuk bisa sekolah lagi. Karena anaknya memang mau sekolah. Dia paling senang sama pelajaran matematika," terang laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu.

Tak jauh dari rumah Ismatun, di Dukuh Kedaung desa yang sama, Muhammad Fakhri Pratama (7) juga akhirnya bisa bersekolah lagi. Fakhri yang sudah tidak memiliki ayah dan tinggal bersama kakek-neneknya itu di tahun 2018 sempat merasakan bangku sekolah selama kurang lebih dua minggu. Namun karena ketidakadaan biaya, akhirnya Fakhri tidak bisa bersekolah lagi. “Kalau tidak ada yang bantu, ga mungkin Fakhri bisa sekolah lagi. Alhamdulillah sudah bisa sekolah sekarang. Anaknya juga sudah minta ingin sekolah,” ujar nenek Fakhri penuh rasa syukur.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) berawal dari Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2016 yang membaca tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Brebes, yaitu mencapai belasan ribu. Bupati Brebes Idza Priyanti dalam berbagai kesempatan menyebutkan, faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di wilayahnya.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) berawal dari Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2016 yang membaca tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Brebes, yaitu mencapai belasan ribu.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Brebes dengan meluncurkan Gerakan Kembali Bersekolah pada 10 Juli 2017. “Karena tingginya angka ATS, kita ingin gerakan ini bisa dibiayai anggaran daerah tidak hanya mengandalkan dukungan dari masyarakat. Tapi untuk itu kan, perlu ada aturannya dulu. Disini KOMPAK membantu kami menyusun aturannya,” ujar Imam Sugiarto, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

Menurut Imam, pada situasi ini peran KOMPAK sangat dominan. Karena KOMPAK berhasil memfasilitasi terbentuknya Peraturan Bupati (Perbup) No.115 tahun 2017 tentang Rintisan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan hadirnya Perbup tersebut, akhirnya tahun 2018 Pemkab menganggarkan Rp5,7 Miliar untuk mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah, baik pendidikan formal maupun non formal. “Tahun 2018, angka ATS tercatat sebanyak 16.874 anak. Targetnya, bisa mengembalikan mereka secara bertahap ke bangku sekolah hingga tahun 2022,” pungkasnya.

Sejak diluncurkan hingga tahun 2019, Gerakan Kembali Bersekolah telah mampu mengembalikan sebanyak 10.779 siswa ke bangku sekolah, baik formal maupun non-formal.

Kolaborasi Mewujudkan Pelayanan Dasar Berkualitas Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedalaman



Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan dan Sidang Itsbat di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara, Kab Pangkep, Sulawesi Selatan. ▲

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. KOMPAK memfokuskan kegiatannya pada: peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum; penguatan tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya, serta pembangunan berbasis masyarakat; dan pengembangan peluang-peluang ekonomi produktif terutama di sektor non-pertanian.

Pada bulan Juni 2017, KOMPAK melaksanakan kunjungan lapangan bersama mitra pemerintah untuk meninjau capaian program, mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran, mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan serta mengidentifikasi hasil dan perubahan. Misi ini difokuskan pada bidang peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan.

Membuka Akses Pelayanan Dasar Melalui Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target nasional kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak yakni 75% (2015), 77,5% (2016), 80% (2018) dan 85% (2019). Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran yang merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Program percepatan kepemilikan akta kelahiran ini didukung dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat yang diterbitkan pada bulan Maret 2017. KOMPAK mendukung penyusunan peraturan bupati tersebut melalui penyelenggaraan diskusi dan konsultasi publik.

Akta Kelahiran bersifat universal karena berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak yang lahir identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Namun di KLU sendiri, angka kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,78% pada tahun 2016.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meluncurkan program JARING PEKAT (Penjaringan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat). Program percepatan kepemilikan akta kelahiran ini didukung dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat yang diterbitkan pada bulan Maret 2017. KOMPAK mendukung penyusunan peraturan bupati tersebut melalui penyelenggaraan diskusi dan konsultasi publik.

“Lombok Utara memiliki kekayaan alam luar biasa yang harus dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan pemimpin masa depan,” kata Najmul Akhyar. “Maka kepemilikan akta kelahiran menjadi penting karena akan membuka akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” tambahnya.

JARING PEKAT merupakan kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan (Puskesmas, rumah sakit umum daerah dan bidan), sekolah dan masyarakat (lembaga kemasyarakatan, adat dan agama) untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akta kelahiran.

Keseriusan KLU dalam melakukan percepatan kepemilikan akta kelahiran ini terbukti dengan keberhasilan KLU dalam mencapai 84% kepemilikan akta kelahiran pada Mei 2017, angka ini merupakan pencapaian tertinggi di NTB.

“Banyak terobosan dan program unggulan KLU yang turut didukung KOMPAK, telah dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen daerah memegang kunci di sini,” sambut Mahatmi

Parwitasari Saronto, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Bappenas ketika melakukan kunjungan ke KLU.

Program ini juga mendapat dukungan baik dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), unit-unit pelayanan dasar, kecamatan, desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama dan adat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung misalnya, menyediakan layanan akta kelahiran bagi bayi baru lahir. Mereka menyediakan bank nama bagi orang tua yang belum mempersiapkan nama bagi anak mereka. Akta kelahiran pun dapat langsung diberikan sebelum ibu dan bayinya kembali ke rumah. Kemudahan serupa juga tersedia di pusat layanan kesehatan lainnya seperti Puskesmas.

Kepala Desa Loloan Kariadi di Kecamatan Bayan mengatakan rendahnya kepemilikan akta kelahiran salah satunya disebabkan banyaknya pernikahan yang tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurutnya, akta kelahiran dapat diurus jika negara mengakui pernikahan orang tua mereka. “Masyarakat belum memahami pentingnya kepemilikan identitas hukum, di samping waktu dan biaya yang harus dikeluarkan jika mengurus surat nikah dan akta kelahiran di kantor Disdukcapil,” imbuhnya.

Selain adanya JARING PEKAT,

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, sebagai mitra KOMPAK, juga melaksanakan Program Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Berbasis Desa Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal juga dilaksanakan di KLU. Program yang telah berjalan sejak Juli 2016 ini dilaksanakan di Desa Loloan, Sambik Elen, Bayan, Anyar dan Akar-Akar di Kecamatan Bayan. Kegiatan percepatan kepemilikan identitas hukum ini dilaksanakan melalui musyawarah desa, pembentukan kelompok kerja identitas hukum, pengumpulan dokumen persyaratan, pelayanan keliling, pelayanan terpadu itsbat nikah, serta peningkatan kapasitas remaja untuk Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pada bulan November 2016, Desa Loloan mengadakan sidang itsbat nikah untuk 27 pasangan dengan pembiayaan swadaya dari masyarakat. Setelah menyadari pentingnya identitas hukum, masyarakat menyuarkan pendapat mereka mengenai pentingnya penganggaran itsbat nikah bagi masyarakat yang tidak mampu. Pendapat ini didukung oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. "Tahun 2017 ini kami menganggarkan Rp 37 juta dalam APBDes untuk membiayai 50 pasangan melakukan sidang itsbat nikah. Biayanya didapatkan dari Dana Desa." terang Kariadi.

Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Kepulauan

Percepatan kepemilikan akta kelahiran juga menjadi salah satu program kerja Pemerintah Daerah Pangkep. Komitmen ini diwujudkan dalam Deklarasi Gerakan Bebas Tuntas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 17 Mei 2017. Gerakan ini lahir dari diskusi pemerintah daerah bersama KOMPAK karena kepemilikan identitas hukum menjadi salah satu fokus program KOMPAK di Sulawesi Selatan. Gerakan ini memberi prioritas pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.

Terobosan pertama gerakan ini adalah dengan melaksanakan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan dan Sidang Itsbat Terpadu di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara pada 6 Juni 2017. Disdukcapil, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep dan Pemerintah Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara berkolaborasi mewujudkan pelayanan pemberian identitas hukum terutama surat nikah, KK dan KTP.

Camat Liukang Tuppabiring Utara Syamsuria Syam mengatakan bahwa pelayanan ini mampu mendorong percepatan kepemilikan identitas hukum di wilayahnya. "Berdasarkan data BPS tahun

Deklarasi Gerakan Bebas Tuntas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 17 Mei 2017. Gerakan ini lahir dari diskusi pemerintah daerah bersama KOMPAK karena kepemilikan identitas hukum menjadi salah satu fokus program KOMPAK di Sulawesi Selatan. Gerakan ini memberi prioritas pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan. ■

2015, jumlah penduduk Liukang Tuppabiring Utara mencapai 11.564 jiwa. Dari jumlah itu baru 30% warga yang memiliki akta kelahiran," terangnya. Menurutnya, rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya kepemilikan identitas hukum, jauhnya akses ke kabupaten, serta belum lengkapnya persyaratan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran.

Dalam pelayanan terpadu ini, Disdukcapil dan pengadilan agama melakukan perekaman data KTP elektronik bagi 50 orang termasuk kelompok penyandang disabilitas, serta sidang isbat bagi 10 pasangan suami-istri. Pelayanan ini diikuti dengan penyuluhan pentingnya kepemilikan identitas hukum.

“Identitas hukum adalah hak setiap warga negara dan menjadi dasar bagi mereka untuk mengakses layanan pemerintah lainnya,” imbuh Syamsuria.

Irik (41) salah seorang penyandang tuna netra asal Desa Mattiro Baji menyadari pentingnya kepemilikan identitas hukum. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini sebelumnya mendapat informasi tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum dari kader YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi Selatan, salah satu mitra strategis KOMPAK. “Saya jadi tahu kalau saya punya KTP, saya bisa ikut kursus menjahit dan bisa dapat bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A. Hamid mengatakan bahwa program KOMPAK mendukung strategi dan rencana kerja pemerintah daerah khususnya dalam mendorong kepemilikan identitas hukum. “Pendataan dan kepemilikan identitas hukum sangat penting supaya program kerja pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A. Hamid mengatakan bahwa program KOMPAK mendukung strategi dan rencana kerja pemerintah daerah khususnya dalam mendorong kepemilikan identitas hukum. ■

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pangkep tampak dalam upaya mereplikasi program kepemilikan identitas hukum ke seluruh 13 kecamatan di kabupaten ini. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan target minimal 60% warga Kabupaten Pangkep memiliki akta kelahiran.

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas Aryawan Soetiarso Poetro mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk mereplikasi program percepatan kepemilikan identitas hukum khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Namun hal ini perlu didukung oleh kerjasama lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. “Pelayanan

administrasi kependudukan yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara adalah sebuah keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, KOMPAK maupun masyarakat. Pola ini perlu dikembangkan dan didukung oleh para pemangku kepentingan di wilayah-wilayah lain,” imbuhnya.

Membangun Sekolah Impian



Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar di Provinsi Papua Barat (Foto: KOMPAK) ▲

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop dan gembor. Hari itu, mereka belajar cara menanam singkong dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana. Bagi anak-anak belajar melalui praktik seperti ini menjadi cara yang efektif dan menyenangkan.

Melalui Program LANDASAN, KOMPAK bekerja untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar lini depan - seperti sekolah dan puskesmas - di 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Program yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan Yayasan BaKTI ini juga mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan layanan dasar.

“Saya memang menginginkan perubahan di sekolah ini,” terang Elizabet Calarce Lesnussa, Kepala sekolah SD YPK Gwereshera.

Menurut Elizabet, yang sejak tahun 1998 menjadi guru di SD YPK Gwereshera, ada banyak tantangan untuk mewujudkan sekolah impian.

“Dulu banyak guru yang tidak hadir mengajar. Anak-anak pun demikian. Mereka lebih suka bermain atau diajak orangtua pergi ke kebun. Dukungan dari masyarakat minim sekali,” terang kepala sekolah asal Pulau Buru ini.

KOMPAK bersama BaKTI, menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan minimum dan manajemen berbasis sekolah. Pelatihan ini membuka mata Elizabet terhadap perubahan yang diperlukan - seperti jumlah guru dan tata kelola sekolah yang baik - untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Perjuangan Elizabet menggagas perubahan menemukan bentuknya sejak dirinya diangkat menjadi kepala sekolah pada 2014. Perempuan berusia 47 tahun itu memberi contoh kepada rekan-rekan sejawatnya. Ia hadir tepat waktu, turun tangan membersihkan sekolah, memberi perhatian pada perkembangan siswa dan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar.

Perlahan tapi pasti, perubahan terjadi. Guru-guru mengikuti jejaknya untuk hadir tepat waktu, mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik, serta berkomunikasi dengan orangtua atau wali murid.

“Tetapi itu semua belum cukup. Kami membutuhkan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola sekolah. Pada saat itulah KOMPAK datang,” tuturnya.

KOMPAK bersama BaKTI, menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan minimum dan manajemen berbasis sekolah. Pelatihan ini membuka mata Elizabet terhadap perubahan yang diperlukan - seperti jumlah guru dan tata kelola sekolah yang baik - untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Melalui pelatihan dan bimbingan selama satu tahun, Elizabet, para guru dan Komite Sekolah membuat banyak terobosan penting. KOMPAK mendukung proses penilaian internal yang dipimpin oleh Elizabet, para guru dan anggota komite sekolah untuk mengetahui apakah sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimum.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, mereka mengembangkan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, manajemen dan administrasi sekolah, serta koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Salah satunya dengan menginisiasi pelajaran tambahan membaca, menulis dan berhitung tiga kali seminggu untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas. Mereka mengaktifkan kembali Komite Sekolah. Bahkan menyediakan ruangan untuk Komite Sekolah sehingga mereka bisa ikut membantu mengawasi siswa sekaligus memudahkan koordinasi dengan masyarakat.

Upaya-upaya tersebut berdampak nyata. Pada tahun 2019, sekolah ini sudah mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Bendahara Komite Sekolah Bernard Inggama mengakui perubahan yang terjadi di sekolah ini. “Dulu SD ini dianggap sekolah buangan. Sekarang jadi sekolah incaran. Banyak orangtua yang ingin anak-anak mereka sekolah disini,” ujar ayah enam anak yang semuanya bersekolah di SD YPK Gwereshera.

Universitas Membangun Desa (UMD) KOMPAK Mengantar Desa Menuju Kemandirian



Kantor Pelayanan Publik Desa Cermee yang Telah Menerapkan Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID). ▲

Pagi itu, sejumlah perangkat desa tengah bersiap untuk melaksanakan rapat koordinasi di Balai Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Rapat ini akan membahas mengenai pengembangan pariwisata di desa yang belakangan mulai populer di kabupaten tersebut. Desa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal kesadaran dan kemampuan mereka untuk mengelola potensi wisata desa setelah mendapatkan pendampingan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD).

UMD merupakan kerja sama KOMPAK bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Jember (UNEJ). Adapun tujuan kegiatan UMD adalah untuk membangun Sistem Informasi Desa (SID), serta memanfaatkannya untuk mewujudkan desa mandiri dalam data dan informasi, pengenalan potensi desa, serta pemasaran produk unggulan desa. Salah satu kegiatan UMD di Desa Glingseran adalah pengembangan serta pengelolaan potensi pariwisata melalui pengenalan tata kelola objek wisata yang baik oleh warga.

Hal ini disambut baik oleh masyarakat, sehingga mulai terbentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bertugas untuk mengelola wisata alam secara langsung. Salah satu potensi wisata yang mulai dikelola oleh Pokdarwis adalah objek wisata Air Terjun Sulaiman. Air terjun yang indah ini sudah ada sejak lama, namun selama ini tak ada yang pernah berpikir bahwa air terjun tersebut mampu menjadi sebuah daya tarik untuk menarik wisatawan.

Pengelolaan pesona air terjun ini juga mampu menarik perhatian Dinas Pariwisata Bondowoso yang belakangan turut membantu Pokdarwis mempromosikan Air Terjun Sulaiman sebagai objek wisata baru di Bondowoso. Tidak berhenti sampai di situ. Pokdarwis bersama warga terus mengeksplorasi potensi sumber daya alam lainnya di Desa Glingseran untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Yang terbaru adalah wana wisata flying fox yang baru saja dibuka oleh pihak desa. Koordinator Desa mahasiswa UMD Dwi Oktavia menyatakan, "Kami melihat kondisi alam di Desa Glingseran ini indah sekali. Pada saat pemetaan potensi desa, kami memasukkan pariwisata sebagai potensinya. Setelah dikomunikasikan dengan masyarakat, ternyata mereka tertarik dan kemudian bergotong royong untuk memaksimalkan potensi yang

Terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bertugas untuk mengelola wisata alam secara langsung. Salah satu potensi wisata yang mulai dikelola oleh Pokdarwis adalah objek wisata Air Terjun Sulaiman.

ada."

Selain itu, ada pula Wisata Taman Rengganis yang konon merupakan lokasi pemandian Dewi Rengganis yang melegenda. Letaknya yang di tengah sungai dengan pemandangan hamparan sawah hijau menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Banyaknya situs megalitikum yang menggambarkan peradaban kuno di Bondowoso juga menjadi daya tarik wisata sejarah yang ditawarkan Desa Glingseran. "Banyak perubahan positif yang terjadi di Desa Glingseran setelah adanya pelaksanaan UMD. Sebelum pendampingan, kami belum menyadari bahwa ada banyak potensi alam yang menjanjikan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi kami," kata Sulaedi, Kepala Desa Glingseran. "Setelah kami kerja bakti membersihkan daerah sekitar air terjun bersama masyarakat dan mahasiswa kelompok kerja nyata (KKN), baru terlihat kalau ternyata air terjunnya indah. Bahkan wisatawan dari luar Bondowoso mulai berdatangan," tambahnya dengan wajah

sumringah.

Dampak lain yang muncul pasca pengembangan wisata di desa adalah berkurangnya pengangguran. Hal ini diakui oleh Sulaedi yang menceritakan bagaimana sebelumnya banyak warga desa yang menganggur atau terpaksa merantau untuk mencari pekerjaan. "Kami sangat merasakan manfaat dari masuknya kegiatan KOMPAK ke desa kami.

Sekarang kami memiliki penghasilan tambahan dengan mengoptimalkan potensi desa untuk membuat berbagai produk unggulan desa berbasis komoditi lokal, seperti produksi makanan kecil, *virgin coconut oil* dan kerajinan tangan," jelasnya. Sulaedi berharap, Desa Glingseran bisa menjadi barometer percontohan untuk desa lain agar mampu keluar dari ketertinggalan. Untuk itu Sulaedi dan warganya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi pariwisata desa.

Salah satunya adalah dengan memberitakan perkembangan desa melalui situs web resmi www.glingseran-bondowoso.desa.id. Selain itu, pihaknya juga rutin menggelar aspirasi warga untuk kemajuan sektor pariwisata di desa. Selain UNEJ, KOMPAK juga menjalin kerja sama serupa dengan beberapa universitas lain seperti Universitas Ar-Raniry, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Universitas Alauddin, Provinsi Sulawesi Selatan, dan

Walaupun kegiatan UMD telah berakhir, tim validasi data akan terus melakukan survei untuk mengakomodasi seluruh warga Desa Cermee. Manfaat lain dari penerapan SAID adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, karena pihak desa membuka akses informasi secara luas.

Universitas Parahyangan,
Provinsi Jawa Barat.

Pelayanan Terpadu Kilat Desa Cermee Tak hanya Desa Glingseran yang menunjukkan perubahan signifikan setelah mendapatkan pendampingan kegiatan UMD. Desa Cermee yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo juga mampu membuktikan bahwa mereka dapat bersaing, meski letaknya cukup jauh dari pusat kota. Desa dampingan UMD KOMPAK ini unggul dalam unit pelayanan terpadunya.

Kepala Desa Cermee, Sutrisno, mengatakan bahwa saat ini pelayanan publik di tingkat desa kian efisien setelah diterapkannya Sistem Administrasi Informasi

Desa (SAID), yang mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi warga yang biasa diurus di tingkat desa. "Sebelum pendampingan, untuk mengurus administrasi memakan waktu lebih lama, karena harus diketik satu persatu. Sekarang warga cukup membawa KTP, menyampaikan permohonannya, kemudian kami tinggal mencetak dan selesai. Proses keseluruhan hanya memakan waktu 5 menit," kata Sutrisno.

Pendampingan yang dilakukan Mahasiswa UMD meliputi tata cara melakukan survei untuk mengumpulkan berbagai data dari warga, melatih aparat desa untuk melakukan validasi data, kemudian memasukkannya ke dalam SAID. Hal ini dilakukan guna memastikan berbagai informasi yang masuk dalam SAID sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama 45 hari kami mendampingi perangkat desa. Sudah ada 200 Kepala Keluarga (KK) yang terdata dari sekitar 2400 KK. Pendataan tersebut cukup detil, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi seperti jumlah penghasilan per bulan, anak, dan pendidikan," terang Zein Arrahman, Koordinator Desa UMD Desa Cermee.

Walaupun kegiatan UMD telah berakhir, tim validasi data akan terus melakukan survei untuk mengakomodasi seluruh warga Desa Cermee. Manfaat lain dari penerapan SAID adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, karena pihak desa membuka akses informasi secara luas. Melalui situs resmi desa www.cermee.desa.id, warga dapat mengajukan berbagai kritik, saran dan masukan serta meminta informasi kepada operator situs desa. "Kami juga mempublikasikan sumber dan penggunaan anggaran desa secara transparan dalam bentuk infografis dan dipublikasikan dalam berbagai bentuk seperti baliho dan poster," ungkapnya.

